

**PERFORMA PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT* DALAM PELAYANAN
ADMINISTRASI MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI KOTO TANGAH BATU
AMPA, AKABILURU, LIMA PULUH KOTA**

**SURYANINGSIH¹, RIANDA PRIMA PUTRI², ZAMHASARI³,
TENGGU FAHRUL GAFAR⁴**

Stisip Imam Bonjol Padang^{1,2}, Universitas Abdurrah^{3,4}

Abstract: *This study aims to see the performance of the implementation of e-Government in administrative services during the covid-19 pandemic in Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Akabiluru district, Lima Puluh Kota regency. The background of this research is Nagari Koto Tengah Batu Ampa is one of the village in Akabiluru district that has implemented e-government in administrative services to the community during the covid-19 pandemic to date. The method used in this research is descriptive qualitative with case study type. This study uses the concept of Booz Allen and Hamilton to see the performance of government implementing e-government in term of five dimensions. That are benefits efficiency, participation, transparency, and change management. The result show that the implementation of e-government in Nagari Koto Tengah Batu Ampa is still not managed optimally because there are four dimensions that have not been optimally implemented (efficiency, participation, transparency, and change management). The benefits of implementing e-government can already be felt by the nagari government and the community even though these four dimension have not run optimally.*

Keywords: *Covid-19, e-government, village, service*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat performa pelaksanaan e-Government dalam pelayanan administrasi masa pandemi covid-19 di Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah Nagari Koto Tengah Batu Ampa merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Akabiluru yang telah menerapkan e-government dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat dimasa pandemi covid-19 hingga saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tipe studi kasus. Penelitian ini menggunakan konsep Booz Allen dan Hamilton untuk melihat performa pemerintahan yang menerapkan e-government dilihat dari lima dimensi, yakni manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government di Nagari Koto Tengah Batu Ampa masih belum terkelola dengan maksimal karena ada 4 (empat) dimensi yang belum optimal pelaksanaannya, yakni dimensi efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan. Manfaat pelaksanaan e-government sudah dapat dirasakan oleh pemerintahan nagari dan masyarakat walaupun 4 (empat) dimensi tersebut belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Covid-19, e-Government, Nagari, Pelayanan.

A. Pendahuluan

Salah satu fungsi dari pemerintah adalah melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika pandemi covid-19 menyerang negara kita sejak Maret 2020, bentuk pelayanan kepada masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis. Perubahan ini dipicu karena diminisialisasinya pertemuan secara langsung karena penyebaran virus dapat terjadi ketika terjadi kontak langsung. Penerapan *e-Government* dalam pelayanan publik pun tidak bisa dihindarkan lagi mulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan desa.

Regulasi mengenai penerapan *e-Government* di Indonesia sudah ada sejak tahun 2003 jauh sebelum Indonesia diserang wabah covid-19. Melalui Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* mulai dikembangkan

penggunaan *e-Government* di seluruh instansi pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pasca dikeluarkannya Inpres No. 3 tahun 2003 tersebut banyak pemerintahan daerah yang kemudian berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan informasi dan komunikasi dalam bentuk situs web, akan tetapi mayoritas situs web pemerintah daerah tersebut masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat kedua (pematangan) sedangkan tingkat ketiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai (Sosiawan, 2008).

Akan tetapi, hasil survey E-Government Development Index (EGDI) yang dikeluarkan oleh PBB menempatkan Indonesia pada peringkat ke 70 dari 193 negara pada tahun 2003 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government. Survei yang dilakukan oleh EGDI ini menggunakan 2 indikator utama, yakni kondisi kesiapan e-government dan tingkat partisipasi elektronik. Jadi, pada tahun 2003 tersebut Indonesia dianggap telah memiliki kesiapan dalam penerapan e-government karena telah memiliki jaringan informasi dan komunikasi dalam bentuk situs web. Peringkat Indonesia dalam pengembangan dan pelaksanaan e-government ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Peringkat E-Government Indonesia Di Dunia

No	Tahun	E-Government Development Index	E-Participation Index
1	2003	70	41
2	2004	85	32
3	2005	96	34
4	2008	106	135
5	2010	109	86
6	2012	97	66
7	2014	106	110
8	2016	116	114
9	2018	107	92
10	2020	88	57

Sumber: <https://publicadministration.un.org/>, 02 Mei 2022

Penerapan e-government diatas, tidak saja dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah akan tetapi sudah sampai pada tingkat desa. Dengan adanya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self governing Community*). Hal ini dapat diartikan bahwa desa dapat menerapkan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. e-Government dalam pemerintahan desa tidak hanya masalah website desa, akan tetapi merupakan sebuah sistem yang terintegrasi oleh teknologi informasi sehingga menjadikan pemerintahan desa menjadi lebih efisien dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa (Watrianthos et al., 2019).

Selain itu, peluang penerapan e-government juga diberikan dalam pasal 86 Undang-undang desa. Dalam pasal disebutkan bahwasannya desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota. Sistem informasi desa tersebut meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Adapaun tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) ini adalah *pertama*, sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung pelayanan, administrasi, dan pelaporan yang akurat; *Kedua*, pengelolaan data dan informasi yang baik akan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar dasar tata kelola yang baik; *ketiga*, Informasi dan data yang berkualitas dan selalu diperbaharui akan sangat membantu dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran; *keempat*, memudahkan pemantauan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh warga desa, pemerintah desa, dan lembaga supra desa (Satria, 2017).

Pada masa pandemi covid-19 sejak awal 2020 yang lalu kebutuhan untuk menerapkan e-government ini sangatlah tinggi karena adanya pembatasan kegiatan. Hal ini juga berlaku hingga ke pemerintahan nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Tingginya kasus dan penyebaran covid-19 di nagari membuat pemerintah nagari mengambil kebijakan untuk membatasi akses pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pembatasan ini pemerintah nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Khususnya Nagari Koto Tengah Batu Ampa mengambil inisiatif untuk menerapkan e-government dalam pelayanan administrasi sesuai dengan kemampuan mereka. Atas dasar hal inilah penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana performa penerapan e-government di Nagari Koto Tengah Batu Ampa mulai dari manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, yakni individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Syahza, 2015). Dengan menggunakan metodologi ini akan didapatkan data secara detail terkait dengan penerapan e-government dalam pelayanan administrasi di Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Administrasi di Nagari Koto Tengah Batu Ampa

Nagari Koto Tengah Batu Ampa merupakan nagari terluas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Kecamatan Akabiluru. Nagari ini memiliki 6 (enam) jorong yakni, Jorong Batu Tanyuah, Jorong Koto Tengah, Jorong Piladang, Jorong Subarang Parik, Jorong Sungai Cubadak, dan Jorong Tambun Ijuak.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Nagari di Kecamatan Akabiluru

No	Nagari	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Koto Tengah Batu Ampa	22,4	9.235
2	Sariak Laweh	21,36	5.936
3	Suayan	12,79	5.481
4	Pauah Sangik	11,97	1.313
5	Batuhampar	10,65	3.613
6	Sungai Balantiak	8,45	1.341
7	Durian Gadang	6,60	1.639

Sumber: BPS Kab. 50 Kota, 2020.

Data penduduk diatas tentunya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota bahwasannya jumlah penduduk Nagari Koto Tengah Batu Ampa pada tahun 2021 (semester 2) berjumlah 9.636 jiwa. Jika dilihat dari data diatas, terlihat bahwasannya Nagari Koto Tengah Batu Ampa memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Hal ini juga tentu berpengaruh pada jumlah layanan administrasi di kantor wali nagari. Layanan administrasi di Nagari Koto Tengah Batu Ampa dalam 1 tahun mencapai ± 1.130 surat. Jika dirata-ratakan setiap bulannya Nagari Koto Tengah Batu Ampa melayani masyarakat dalam hal layanan administrasi mencapai ± 95 surat.

Sebelum pandemi covid-19 menjadi wabah, Nagari Koto Tengah Batu Ampa melakukan layanan administrasi kepada penduduknya secara manual. Dengan artian, perangkat nagari mengetik setiap permintaan surat dari masyarakat dan tentu saja hal ini banyak sekali kelemahannya. Diantara kelemahan tersebut adalah waktu layanan relatif lama, adanya ketergantungan terhadap kemampuan komputer tenaga administratif tertentu cukup besar, format surat tidak standar, dan pencatatan administratif yang kurang baik (Sibaroni et al., 2015). Dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia pada umumnya dan Nagari Koto

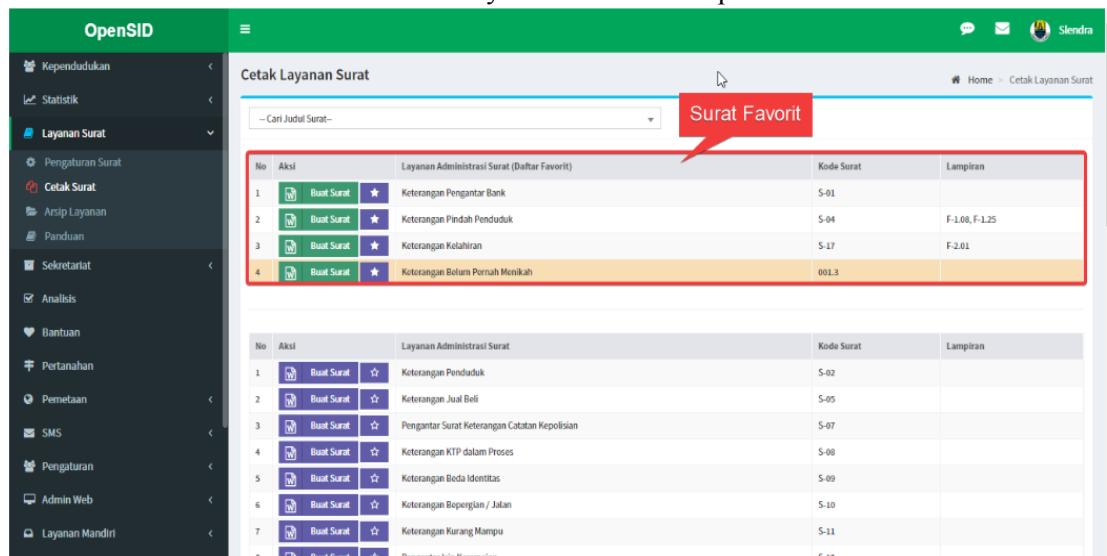
Tengah Batu Ampa pada khususnya yang kemudian membatasi kegiatan untuk tatap muka secara langsung. Dengan adanya pembatasan sosial sampai dengan tingkat nagari ini kemudian menimbulkan ide pada salah satu staf pelayanan Nagari Koto Tengah Batu Ampa. Ide yang kemudian dikembangkan dengan pencarian aplikasi untuk memudahkan bagaimana melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Hasil browsing dari internet membuahkan hasil dengan dipertemukannya staf tersebut dengan komunitas peduli Sistem Informasi Desa (SID).

Dalam situs dijelaskan <https://opendesa.id/tentang-kami/> bahwa OpenSID merupakan sebuah aplikasi sistem informasi desa (SID) yang dikembangkan sejak Mei 2016. Komunitas ini bersepakat untuk merancang dan mengelola OpenSID secara terbuka dan dapat dikembangkan bersama-sama oleh komunitas peduli SID. Staf Nagari Koto Tengah Batu Ampa masuk dan bergabung menjadi anggota komunitas pada tahun 2020 dan kemudian mendapatkan aplikasi OpenSID. Aplikasi OpenSID ini didapatkan secara gratis dan mulai dilakukan ujicoba sejak tahun 2020 dan baru diaplikasikan pada tanggal 01 Januari 2021. Aplikasi OpenSID ini memberikan manfaat kepada nagari, salah satunya adalah mempermudah dan mempercepat pelayanan khusus dibagian administrasi.

Aplikasi OpenSID dapat dikelola dalam 2 (dua) ranah oleh pemerintahan desa/nagari, yakni secara offline dan secara online. Aplikasi secara offline diinstal dalam omputer server di kantor desa/nagari dan hanya dioperasikan sebagai server pusat (pusat data) yang bersifat lokal. SID offline hanya bisa diakses dalam jaringan lokal dan diterapkan dalam penggunaan aplikasi SID harian. Hasil dari proses data secara offline ini dapat diunggah ke sistem online secara berkala. SID yang dioperasikan secara online akan optimal jika terhubung ke internet sebagai sistem online berbasis web yang otomatis berfungsi sebagai website desa. Website desa ini terbagi dalam dua bagian, yakni: bagian depan yang bisa diakses oleh publik dan bagian dalam yang hanya bisa diakses oleh administrator sistem. Untuk Nagari Koto Tengah Batu Ampa masih menggunakan OpenSID ini secara offline sehingga masyarakat belum bisa mengakses OpenSID tersebut.

Pada tahun 2019 Komisi Informasi dan Komunikasi (Kominfo) Kabupaten 50 Kota memberikan website gratis kepada nagari untuk dikelola, akan tetapi pada awal 2020 nagari tidak melakukan perpanjangan karena Kominfo Kabupaten 50 Kota meminta bayaran sebesar Rp. 150.000/bulan. Adapun kendala yang dihadapi oleh nagari adalah tidak adanya anggaran untuk mengalokasikan dalam kegiatan tersebut dan belum adanya kapasitas perangkat nagari untuk mengelola website nagari. Adapun jenis form surat yang disediakan oleh OpenSID sangat banyak dan nagari dapat menambahkan form surat baru jika ada surat yang tidak disediakan formnya oleh OpenSID. Adapun jenis form surat yang telah disediakan oleh OpenSID dan surat yang telah ditambahkan oleh Nagari Koto Tengah Batu Ampa adalah surat keterangan pindah penduduk, keterangan kurang mampu, keterangan usaha, keterangan domisili, keterangan domisi usaha non warga, keterangan meninggal dunia, keterangan penghasilan orang tua, pengantar SKCK, keterangan belum menikah, keterangan aktif di masjid, keterangan terdampak covid-19, keterangan tidak memiliki SPT PBB, surat kuasa, dan lain sebagainya. OpenSID juga memberikan kemudahan bagi penggunaannya yakni dengan dapat menandai surat yang menjadi favorit berdasarkan intensitas penggunaan daftar surat tersebut. Hal ini tentu saja memudahkan admin nagari untuk lebih cepat mencari jenis surat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Layanan Surat Pada OpenSID



Sumber: <https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Pengaturan-Surat>, Diakses tanggal 22 Mei 2022.

Dalam penerapan e-government bidang pelayanan administrasi ini, Nagari Koto Tengah Batu Ampa memiliki alur tersendiri. Pada masa Covid-19 berada pada level yang tinggi, masyarakat dapat mengurus surat dengan mengirimkan WA ke staf nagari. Jika surat sudah selesai masyarakat datang ke kantor wali nagari hanya untuk menjeput surat yang dibutuhkan tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak berjalan maksimal karena banyak masyarakat awam yang ada di nagari tidak pandai menggunakan *smart phone* untuk WA sehingga kebanyakan dari warga masyarakat untuk datang langsung ke kantor wali nagari.

2. Performa Penerapan E-Government dalam Pelayanan Administrasi di Nagari Koto Tengah Batu Ampa.

Penerapan e-Government dalam pelayanan administrasi di Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota jika dilihat dari 5 dimensi, yakni dimensi manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan belumlah berjalan optimal karena OpenSID yang diterapkan masih bersifat offline.

Dimensi Manfaat. Dimensi ini mengukur bagaimana cakupan layanan yang diimplementasikan, bagaimana layanan tersebut bisa diakses, dan bagaimana kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut. Jika dilihat dari penerapan OpenSID di Nagari Koto Tengah Batu Ampa cakupan layanan yang diimplementasikan masih sekitar layanan administrasi surat menyurat dan ini masih bersifat offline. Adapun manfaat yang sudah dirasakan masyarakat dengan adanya OpenSID ini adalah waktu pembuatan surat menjadi lebih cepat dan tidak perlu antrian lama. Melalui aplikasi SID juga kebutuhan surat menyurat tidak lagi dikerjakan secara manual tetapi hanya memasukkan nama dan nomor penduduk maka akan muncul standar baku surat yang dibutuhkan (Rianto et al., 2017). Jika masih offline tentu saja masyarakat belum mendapatkan kemudahan akses secara optimal. Untuk pengembangan ke online Nagari Koto Tengah Masih dihadapkan pada kendala sumber daya manusia. Belum ada perangkat nagari atau staf yang khusus mengelola OpenSID ini. Adapun menu dari OpenSID ini sangat lengkap seperti info desa (identitas desa, wilayah administratif, pemerintah desa, status desa, layanan pelanggan, lembaga desa), Kependudukan (penduduk, keluarga, rumah tangga, kelompok, data suplemen, calon pemilih), Statistik (statistik kependudukan, laporan bulanan, laporan kelompok rentan, dan statistik laporan penduduk), Kehadiran (jam kerja, hari libur, rekapitulasi, pengaduan, dan lainnya), Layanan Surat, Sekretariat, Keuangan, Buku Administrasi Desa, dan lainnya.

Dimensi Efisiensi. Pada dimensi ini Nagari Koto Tangah Batu Ampa belum memenuhi indikator yang ada secara optimal. Jika dilihat dari aplikasi, Nagari Koto Tangah batu Ampa telah memiliki OpenSID dan telah diterapkan, akan tetapi untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi ini belum ada. Perencanaan sumber daya manusia melalui pengadaan staf ataupun pelatihan bagi perangkat nagari yang membidangi ini belum ada serta dari perencanaan keuangan pun belum terlihat. Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2021 belum terlihat adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terlaksananya e-Government melalui aplikasi OpenSID ini. Terlihat bahwasannya arah kegiatan nagari masih untuk kegiatan penanganan covid-19 dan kegiatan lainnya.

Dimensi Partisipasi. Jika dilihat pada dimensi ini, seluruh indikator tidak berjalan karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya OpenSID yang telah diterapkan oleh Nagari Koto Tangah Batu Ampa masih bersifat Offline. Keterlibatan masyarakat berbasis web belum berjalan, baik itu terkait dengan umpan balik dan keinginan masyarakat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum. Partisipasi masyarakat masih menggunakan media lain, seperti facebook, twitter, dan instagram.

Dimensi Transparansi. Pada dimensi ini yang menjadi indikator adalah seberapa banyak informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan informasi permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam dimensi ini hal tersebut belum bisa terukur karena OpenSID nagari masih bersifat offline. Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan oleh nagari masih menggunakan media-media lainnya dan yang paling ramai adalah di facebook milik nagari.

Dimensi Manajemen Pemerintahan. Dimensi ini mencoba mengukur bagaimana strategi pengembangan OpenSID yang telah diterapkan oleh nagari Koto Tangah Batu Ampa serta bagaimana kualitas kontrol dan review dari pemangku kepentingan yang ada di nagari serta keterlibatan dan motivasi dari perangkat nagari yang membidangi hal ini. Setelah OpenSID direalisasikan penerapannya di Nagari Koto Tangah Batu Ampa belum ada dibicarakan oleh kasi/kaur yang bertanggungjawab kepada wali nagari terkait dengan pengembangan OpenSID ini. Pengontrolan terhadap aplikasi dan kinerja dari aplikasi OpenSID juga tidak berjalan sehingga untuk pengembangan aplikasi menjadi online belum masuk dalam pembahasan antara wali nagari dan perangkatnya.

D. Penutup

Performa pelaksanaan e-government dalam pelayanan administrasi masa pandemi covid-19 di Nagari Koto Tangah Batu Ampa belumlah optimal. Dari lima dimensi yang menjadi alat ukur, hanya 1 (satu) dimensi yang dapat berjalan, yakni dimensi manfaat. Hal ini disebabkan aplikasi OpenSID yang telah diimplementasikan di Nagari Koto Tangah Batu Ampa sejak tahun 2021 belum tersentuh untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh nagari. Adapun kendala dalam pengembangan aplikasi OpenSID ini terletak pada manajemen pemerintahan, yakni tidak adanya strategi pengembangan aplikasi dari offline ke online, tidak adanya anggaran untuk pengembangan aplikasi yang ada, dan tidak adanya pelatihan bagi perangkat nagari terkait dengan pengembangan aplikasi OpenSID ini.

Daftar Pustaka

- Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK. *Positif (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 3 (2), 99–105. <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/positif/article/view/429>
- Indrajit, R. E., Zainuddin, A., & Rudianto, D. (2005). *e-Government in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia* (1st ed.). Andi Offset.
- Rianto, P., Wahyono, S. B., Kurnia, N., Adiputra, W. M., Wendratama, E., & Poerwaningtias, I. (2017). *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi* (1st ed.). Pemantau Regulasi dan

- Regulator Media (PR2Media).
- Satria, S. (2017). *Kerangka Kerja Untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa yang Terintegrasi* (1).
- Sibaroni, Y., Setiawan, E. B., Imrona, M., & Dzuhri, F. A. (2015). Aplikasi Pelayanan Administrasi Penduduk Desa Berbasis Web Programing. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi)*.
https://scholar.google.com/scholar?q=Aplikasi+Pelayanan+Administrasi+Penduduk+Desa+Berbasis+Web+Programing&hl=id&as_sdt=0,5
- Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi Implementasi e-Government Pada Situs Web Pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen. *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Perspektif Content Dan Manajemen*, 88–98.
<http://103.23.20.161/index.php/semnasif/article/view/759/639>
- Sulistyowati, F., & Dibyorin, C. R. (2013). Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa. *Komunikasi ASPIKOM*, 2 (1), 579–588.
<http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/34/34>
- Syahza, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. UR Press Pekanbaru.
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Syaifullah, M. (2019). Model e-government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah Unikom*, 17 (1), 53–60. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurnal-unikom/article/view/2239/1523>
- Wijoyono, E. (2016). *Sistem Informasi Desa (SID): Perumusan Konsep Pendidikan dan Replikasi Inisiatif SID di Provinsi Jawa Timur*. Combine Resource Institution.
<https://adoc.pub/sistem-informasi-desa-sid-perumusan-konsep-pendidikan-dan-re.html>